

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DINAS KESEHATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga Laporan Penyelenggaran Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggaran layanan publik dengan publik. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan di Dinas Kesehatan

Purbalingga, 14 Februari 2025  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga



dr. JUSUFEBRIANTO, MPH

Pembina Tk. I

NIP. 19700219 200212 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan dan Manfaat .....	3
3. Ruang Lingkup .....	4
4. Dasar Pelaksanaan .....	4
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP .....	5
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	5
2. Penyelenggara dan Peserta FKP .....	5
3. Metode Pelaksanaan FKP .....	5
4. Susunan Acara FKP .....	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP .....	8
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Analisis .....	8
3. Rencana Aksi .....	9
D. PENUTUP .....	10
LAMPIRAN .....	11

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab pemerintahan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa.

Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara telah ditetapkan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi Rumah Sakit dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Dinas Kesehatan. Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada

penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

### **A. Tujuan**

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rencangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **B. Manfaat**

1. Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan:
  - a. Memperoleh masukan dan publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
  - b. Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
  - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - d. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dan kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
3. Manfaat FKP bagi Publik:
  - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Survey Kepuasan Masyarakat;
4. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

### **4. Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Terakhir Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- f. Peraturan Presiden 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- i. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Waktu : Jum'at, 14 Februari 2025
- b. Tempat Pelaksanaan : Gedung Operating Room Komplek Pendopo  
Dipokusumo

### **2. Penyelenggara dan Peserta FKP**

- a. Penyelenggara FKP : Forum Konsultasi Konsultasi Publik  
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga
- b. Peserta : 50 orang

### **3. Metode Pelaksanaan FKP**

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga berbentuk Tatap Muka yaitu melalui Rapat Bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Penyelenggara Layanan
- b. Pengguna Layanan
- c. Stake holder pelayanan publik
- d. Ahli/ Praktisi
- e. Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam penyelenggara Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut:

#### **A. Pra Pelaksanaan**

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP;



- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara);
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/ isu permasalahan.

#### **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- 1) Tim FKP bersikap Independen/ netral dalam proses diskusi;
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/ isu tertentu;
- 4) Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

#### **C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP;
- 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP;
- 3) Kepala Dinas memantau komitmen perbaikan
- 4) Dilakukan pengawasan oleh Masyarakat selaku peserta FKP;
- 5) Monitoring dan Evaluasi oleh Bupati Purbalingga sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 6) Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Purbalingga dan melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri PANRB;
- 7) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

#### **4. Susunan Acara FKP**

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	PIC
---------------	-------	----------	-----

Jum'at, 14 Februari 2025	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta FKP	Panitia
	08.30 – 08.40	Pembukaan	Seksi Acara
	08.40 – 08.50	Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	Seksi Acara
	08.50 – 09.00	Doa	Panitia
	09.00 – 09.10	Sambutan Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
	09.10 – 09.25	Sambutan Ketua Komisi III Kab. Purbalingga	Komisi III
	09.25 – 09.30	Pengenalan Moderator	Seksi Acara
	09.30 – 09.45	Presentasi 1 (Profil Dinkes)	Narasumber 1 (Kepala Dinas)
	09.45 – 10.00	Presentasi 2 (Forum Konsultasi Publik)	Narasumber 2
	10.00 – 10.20	Diskusi	Moderator
	10.20 – 10.35	Penyusunan Rencana Perbaikan	Moderator
	10.35 – 10.50	Penandatanganan Komitmen dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik	Moderator
	10.50 – 11.00	Penutup	Seksi Acara

## **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2024 masih jauh dari target yang ditetapkan, dan beban kesehatan yang masih tinggi, serta sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah;
- 2) Mitigasi permohonan UHC setelah pe-nonaktifan peserta PBI APBD 2 TMT 1 Desember 2024
- 3) Rencana kerja dengan BPJS Kesehatan
- 4) Pencegahan kecurangan/Fraud JKN
- 5) Nilai threshold peserta yang dipersyaratkan 80% harus dicapai di tahun 2025
- 6) Mitigasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan

### **2. Analisis**

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajiban sebagai penerima layanan. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan, maka akan semakin banyak masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan Dinas Kesehatan agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dilakukan analisa untuk menindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan publik sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mendukung Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 2) Perlu dilakukan secara sistematis agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal dan tidak terjadi lonjakan pengaduan atau krisis layanan
- 3) Dalam rangka menanggulangi dampak penonaktifan peserta PBI dan menjaga keberlangsungan **Universal Health Coverage (UHC)**

### 3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Mitigasi permohonan UHC setelah penonaktifan peserta PBI APBD 2	kerjasama lintas program dan lintas sektoral	Tahun 2025
2	Rencana kerja dengan BPJS Kesehatan	tidak ada penonaktifan peserta PBI APBD 2	Tahun 2025
3	Pencegahan kecurangan/Fraud JKN	Tim pencegahan kecurangan/fraud JKN di tingkat kabupaten dipimpin oleh inspektorat kabupaten	Tahun 2025
4	Nilai threshold peserta yang dipersyaratkan 80% harus dicapai di tahun 2025	penyesuaian anggaran dan kepesertaan	Tahun 2025
5	Mitigasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan	penyesuaian anggaran dan kepesertaan	Tahun 2025

#### **D. PENUTUP**

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kesehatan
2. Dari penyelenggara FKP ini, diperoleh masukan bagi Dinas Kesehatan untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produksi maupun kualitas layanan
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan
4. Dinas Kesehatan untuk bias segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat
5. Dinas Kesehatan akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi
6. Rancana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Purbalingga, 14 Februari 2025  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga



dr. JUSI FEBRIANTO, MPH

Pembina Tk. I

NIP. 19700219 200212 1 004

**LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah  
Telepon (0281) 891034 Fax (0281) 893278  
Website [www.dinkes.purbalinggakab.go.id](http://www.dinkes.purbalinggakab.go.id)

Purbalingga, 12 Februari 2025

Nomor : 005/16  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada  
Yth. (Terlampir)  
  
di –  
Purbalingga

Sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, kami bermaksud akan mengadakan Sosialisasi Peraturan tersebut. Dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Februari 2025  
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Gedung *Operating Room* Komplek Pendopo Dipokusumo  
Keterangan : 1. Direktur Rumah Sakit hadir beserta Kepala Bidang Pelayanan Medik  
2. Kepala Puskesmas hadir beserta dokter Pj Cluster dewasa dan lansia  
3. Mohon hadir tepat waktu

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Purbalingga



dr. Jusi Febrianto, MPH  
NIP. 197002192002121004





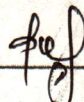
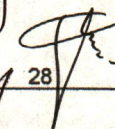
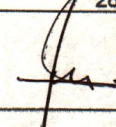
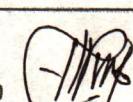
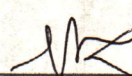
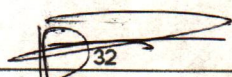
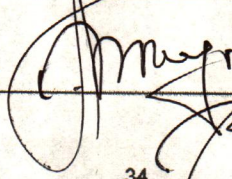
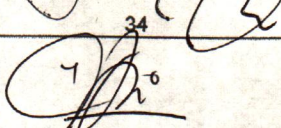
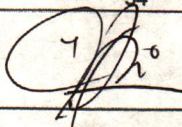
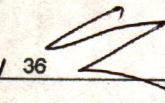

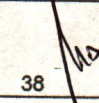
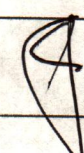
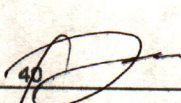
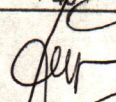
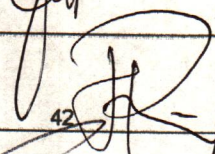

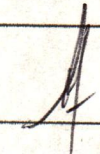


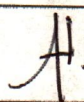
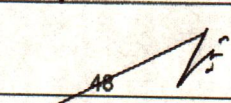
# DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal  
Waktu  
Tempat  
Acara




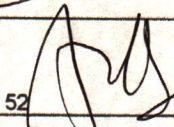
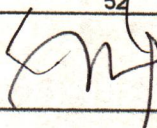
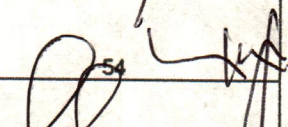
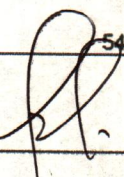
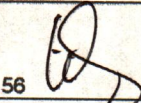
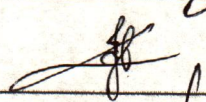
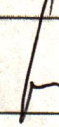
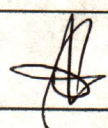
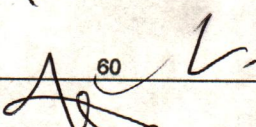
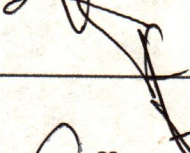
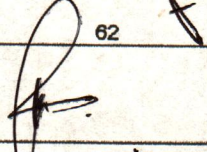
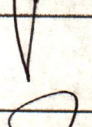
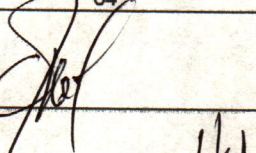
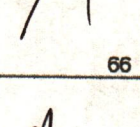
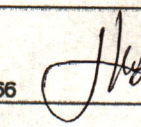

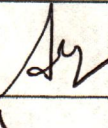
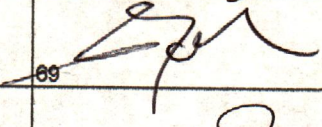
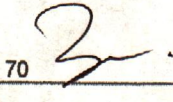
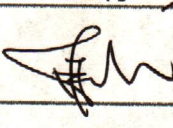
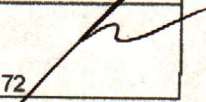
: Jumat, 14 Februari 2025  
: Pukul 08.00 WIB sd selesai  
: Gedung Operating Room Komplek Pendopo Dipokusumo  
: Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	dr. Yasminta P.	DU	PKM Farangreja	1
2	dr. Okmanintu DUD	DU	PKM Bojong	2
3	dr. Utami fs	Dokter	PKM Rembang	3
4	dr. Rini wahid	Kadisa Dok	bmhs	4
5	dr. Devy H.S	Katim Surimi	Dokter	5
6	Endah. S.	Kasubag TU	Pustk Karamajis	6
7	Enten Purwiharan	Ka. Sub. Bag. TU	Pustk Butateja	7
8	dr. wido	DU	PKM Padamara	8
9	SELIMI	Widy. TU & m	Ren Wile	9
10	dr. Danti	Seksi Juru MHS	RSN Mule	10
11	dr. Anggoro RS	PU	PKM Kawangayen	11
12	dr. Daring	DU	PKM Lakse Jay	12
13	dr. Atf	DU	PKM Karmasari	13
14	Widayanti	Sub. Bag. RM	RSUD Panji Ngoro	14
15	Naning P	Kabid APD	Dipermasdes	15
16	Novia Apriliana	PS Kelas 3	Puskemas Sragu Larangan	16
17	Endah K.	Kabid Umum	PKU PBE	17
18	Mariono	Kasi Pelayanan	PKU PBE	18
19	dr. Nur Anwar	Donor M.	PKM. Lumbung	19
20	Purijah	Kesko	131	20
21	Wasis Ryo	Agpro	PKM Bogyri	21
22	Aqung b	Dmb.	Dmb.	22
23	dr. Brian P	Yan med	RSU HI	23
24	dr. Dewi NM	Dokter	PKM Bojongson.	24

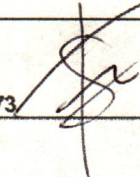

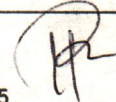
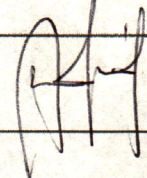
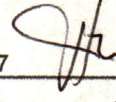
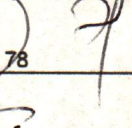
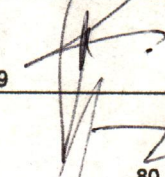
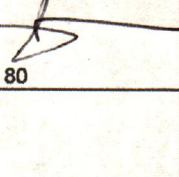
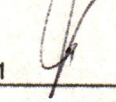
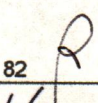
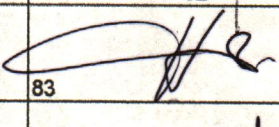
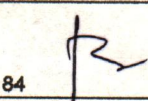
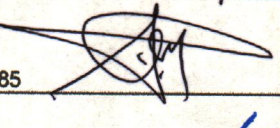
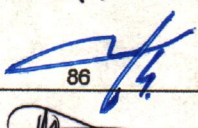

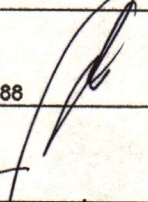
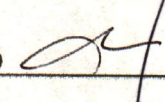
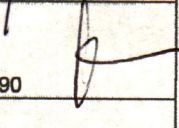


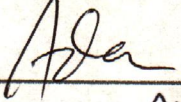
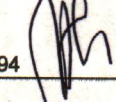


25	dr-Dinar	PKM Bukaya	Dokter	25	
26	Dr. Umi M.	PKM Bobosari	Dokter	26	
27	dr Umu Nani	PKM Kalkayan	Dokter	27	
28	dr. Ego Pui P.	RSU Harapan Jkr	Direktur	28	
29	Melani Jufri K	Dinasor	Staf	29	
30	Renny Dwi A.	Dinasor	Staff	30	
31	dr Nur Syarifah	PKM Kr tengah	Kapus	31	
32	dr Ruo	PKM Kragan	Dokter	32	
33	Sutarno	RSud Pbg	Seleb xanmed	33	
34	Reshyanti TR	PKM Pbg	Kapus	34	
35	Talimar P.S	PKM Pbg	Promkes	35	
36	Dr. Arkandiy	RSI A+ - Th	Dokter	36	
37	dr. Krisna	RSI A+ - Th	Dokter	37	
38	Maksum	PKM Kalkayan	Ko. pro	38	
39	Supriyadi	Pusk Bagan	Kapus	39	
40	gandhi	Pusk Bobosari	Kapus	40	
41	Dr Sri F S	Pusk Bagan	Dokter	41	
42	dr. Retno S.H.	Plan Kasmus	Dokter Kalimantan	42	
43	Wahyuni Alam	RSUD PN	Direktur	43	
44	Aprilia Eka T	Dokter	Promkes	44	
45	Febby Eka P.	Pusk. padaman	Ko. Tu	45	
46	Alvin J	BIPKAS	P2PM	46	
47	Edot Y	Dinkes.	farmaker	47	
48	dr. Widayat	RS PTI	yarnet	48	



49	dr. RS. Hasmi	Asklin	Agus Asklin	49	
50	dr. NOST	PKM Kragjanu	dokter	50	
51	Dwi Seti	PKM Serla	fa. Post.	51	
52	dr. Rance (Rance)	Pura Jember	dokter	52	
53	Deni S	Dokter		53	
54	Winarti	Dokter		54	
55	Her	Mrebel	Kepus	55	
56	<del>Dr</del>	RSIA MPPB		56	
57	dr. Rance Lina	RSIA MPH	Dokter	57	
58	Elea Lenarhi	Dokter		58	
59	dr. Bayu	KJB	dokter	59	
60	dr. Kusti	PKM KMS	Kapusi	60	
61	Sutarsi	PKM. Kr. no nol	Kr. TV	61	
62	Ami Lenani F	Purk Kalimantan	Kapus	62	
63	dr. Loras Dyal	Pusk Kutasari	Dokter	63	
64	Ishwanto	Pusk. Rembag	Kaput	64	
65	Seharno	Pleu Kragke	Kepus	65	
66	Tri Maritawati	PSU SM PB6	Man kep.	66	
67	Is Naeli M	Pusk KTS	Ka Sub Bag TU	67	
68	A. Ratnawati	CDK	Analisis SOMA PUDA	68	
69	L. P. P. P.	Kantau	Dokter	69	
70	Bannyu	Yany	Dur	70	
71	Faturrahman	Shif Yan	Pulu	71	
72	dr. Fiquet	Seksi	Pulu	72	



73	dr. Sofian Palupi	Siaga Modula Pulihpalinggi	Yamud Manyanmon	73	
74	dr. Panal	PSIA UH	Manyanmod	74	
75	Merpi	PSIA UH	base man	75	
76	Aminah	Dinpendukcap	Kabid PIAH	76	
77	Af Hady I	Pla. bage	ke phar	77	
78	Muhar	Bag. - Kesa	Analir Kage	78	
79	dr. Laras	IDI Phg	Dokter	79	
80	Triah H	R-P		80	
81	K. I. Schia	Dinle	Kg. Gm	81	
82	dr. Rin	Punya	Kgm	82	
83	ZORI	Cimu	staf	83	
84	Wanxana	puc kage	Kpau	84	
85	SUPRIYANTO	Puch Bajang	Kapus	85	
86	dr. Rakesyuply	Pla. Pgdaga	Kaps	86	
87	dr. Wiumi	DP Roud Eady	berdy	87	
88	dr. NIA Mmmmm	Yankes	Dinkes	88	
89	Buati S.	Umpeg	Dumen	89	
90	Aldi	Umpeg	Dumen	90	
91	Petao baricari	Yanu	Dum	91	
92	Ria SAFAR	Yankes	Dinkes	92	
93	EN/Ad	Yala	Dur	93	
94	Susian	Yankes	Pelaksana & Ph	94	

Kepala Bidang Pelayanan  
Kesehatan dan SDK

dr. Sulistya Rigi Chandra Dewi, M.Kes  
NIP. 19720110 200212 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

## DINAS KESEHATAN

Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah

Telepon. (0281) 891034 Faks. (0281) 893278

Website: [www.dinkes.purbalinggakab.go.id](http://www.dinkes.purbalinggakab.go.id)

## FORUM KONSULTASI PUBLIK

Purbalingga, Jum'at 14 Februari 2025



14 Feb 2025, 08.33



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN

Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah  
Telepon. (0281) 891034 Faks. (0281) 893278  
Website: www.dinkes.purbalinggakab.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS  
KESEHATAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, yang telah ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Belum Ada Tim ILP menyusun SK Bupati tentang Implementasi ILP serta SOTK Puskesmas berdasarkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)	Membentukan Tim ILP menyusun SK Bupati tentang Implementasi ILP serta SOTK Puskesmas berdasarkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)	Tahun 2024
2	Puskesmas belum melakukan pemetaan Sumber Daya di Puskesmas, menyusun Struktur Organisasi serta SOP dan Alur Pelayanan ILP	Puskesmas melakukan pemetaan Sumber Daya di Puskesmas, menyusun Struktur Organisasi serta SOP dan Alur Pelayanan ILP	Tahun 2024

Demikian Laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga

dr. JUSI FEBRIANTO, MPH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700219 200212 1 004

Kepala Bidang Pelayanan dan SDK

dr. Sulistya Rini Candra Dewi, M. Kes  
Pembina  
NIP. 19720110 200212 2 003